



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2026**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengukuran dan peningkatan kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan

- Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam:
- a. menyusun dan menetapkan dokumen kinerja; dan
 - b. melaksanakan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- KETIGA : Pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan indikator kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. menyampaikan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkala.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2025

tentang Penetapan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2026

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

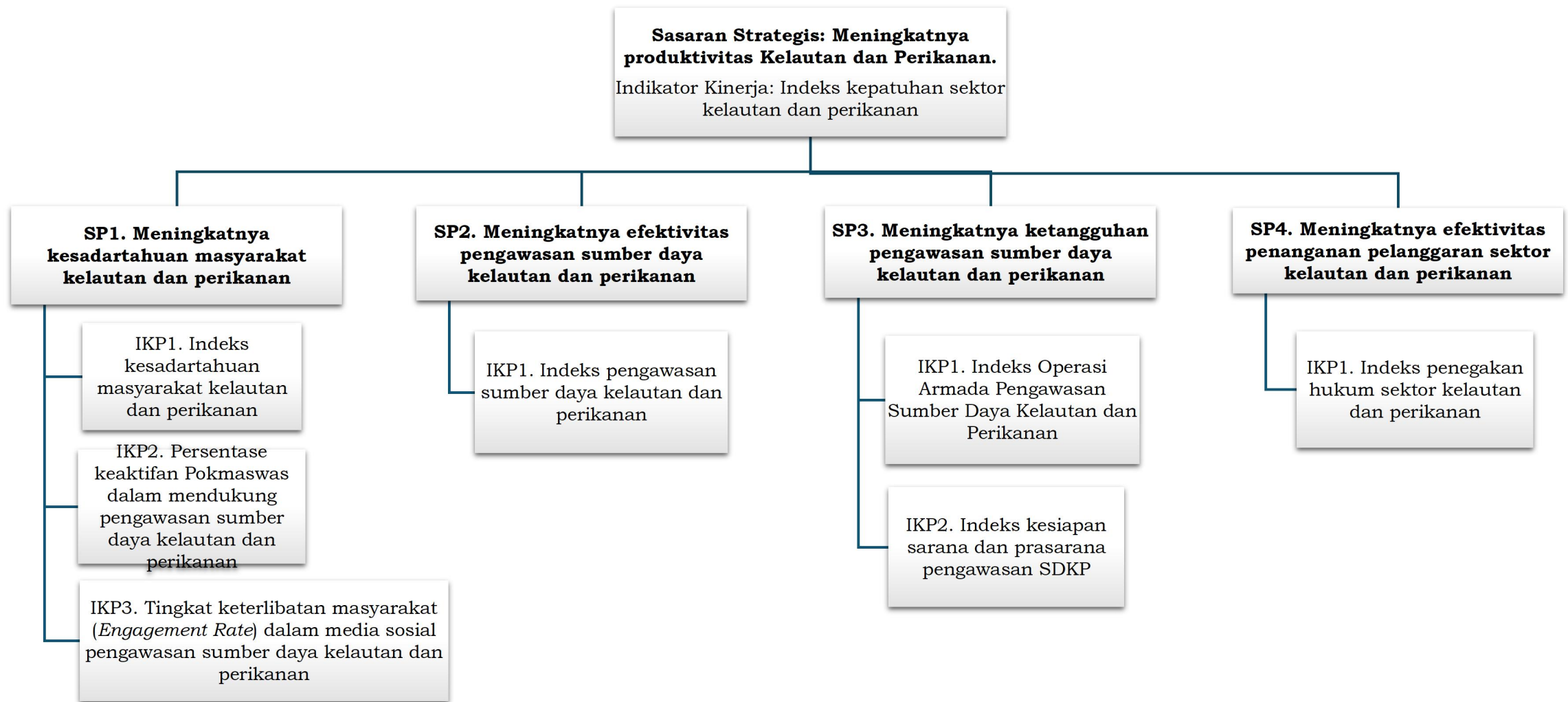


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.

INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

A. Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026



B. Cascading Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	Indeks kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	81	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan	81	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
				Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan	81	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP	91	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83	UPT/Tugas Pembantuan
				Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	83	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
				Persentase penyelesaian pedoman pembinaan pokmaswas	100%	
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	>1	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP	86%	Sekretariat Ditjen PSDKP
Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	76	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100%	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
				Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	83	
			Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	UPT dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	76	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
				Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	UPT dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
				Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	76	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
			Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan UPT
				Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	86	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
				Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	81	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
			Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan UPT
				Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	86	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
				Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	81	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
			Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan	100%	Direktorat PSDK dan Direktorat PSDP

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
			sumber daya kelautan dan perikanan	perikanan		
Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	93	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92,25	Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan UPT
				Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95,25	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
				Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92,25	UPT
				Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	100	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
				Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	80	
				Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	77,5%	
				Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100	Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan UPT
			Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	81	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
				Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	60%	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
				Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60%	
				Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	40	

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	40	
				Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	100	
				Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	100	
			Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	100%	Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan Direktorat Prasana dan Sarana Pengawasan
Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	81	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	82	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT
				Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	82	Direktorat Penanganan Pelanggaran
				Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	82	UPT
				Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	82	Direktorat Penanganan Pelanggaran
			Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
			Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks kualitas supervisi penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	76	Direktorat Penanganan Pelanggaran
				Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)	72	
				Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100%	
				Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau	100%	
				Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakkan Hukum Kelautan dan Perikanan	76	Direktorat Penanganan Pelanggaran
				Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70%	Sekretariat Ditjen PSDKP
			Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	81%	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
			Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	100%	Direktorat Penanganan Pelanggaran
Tata kelola pemerintahan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi	86,5	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	81,75	Sekretariat Ditjen PSDKP

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Ditjen PSDKP		dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP	81,75	UPT
				Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1	Sekretariat Ditjen PSDKP dan UPT
				Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81,5	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,5	Unit Eselon 2 dan UPT
				Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88,2	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	88,2	Unit Eselon 2 dan UPT
				Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,6	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100%	Sekretariat Ditjen PSDKP, Unit Eselon 2 dan UPT
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	86%	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86%	Eselon 2 dan UPT
				Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen PSDKP	<0,5%	Sekretariat Ditjen PSDKP

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	3,7	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8	UPT
				Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Nilai Pembangunan Integritas Ditjen PSDKP	77	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Cilacap
				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	81/75	Sekretariat Ditjen PSDKP, Eselon 2 dan UPT
				Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	Sekretariat Ditjen PSDKP, Eselon 2 dan UPT
				Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71	Unit Eselon 2 dan UPT
				Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	61	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	77%	Sekretariat Ditjen PSDKP

Level I			Level II			
Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2026	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
				Persentase Implementasi Kerjasama	80%	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	Sekretariat Ditjen PSDKP
				Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	66%	Sekretariat Ditjen PSDKP

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PUNG NUGROHO SAKSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2026

A. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	a. Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan	Formula: $x_k = \sum_{k=0}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots x_n)}{n}$ Keterangan: x_k : Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan x_n : Nilai kesadaran responden n : Jumlah responden	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Sekretariat Ditjen PSDKP
		b. Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Formula: $x_p = \sum \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ Keterangan: x_p : Rata-rata nilai keaktifan Pokmaswas yang dibina x_n : Nilai keaktifan suatu kelompok Pokmaswas n : Jumlah Pokmaswas yang dibina	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dan UPT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		c. Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Formula: $x = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ Keterangan x : Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan x_n : Nilai <i>Engagement Rate</i> masing-masing media sosial yang digunakan n : Jumlah media sosial yang digunakan	Sekretariat Ditjen PSDKP
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Formula: $x = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}{5}$ Keterangan: x : Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks) x_1 : Nilai kualitas pemantauan SDKP di WPP NRI x_2 : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan x_3 : Nilai kualitas operasi intelijen perikanan x_4 : Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan x_5 : Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Direktorat Pengendalian Operasi Armada

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3.	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Formula: $x = \frac{(x_1 + x_2 + x_3)}{3}$ Keterangan: x : Indeks kinerja operasi armada pengawasan x_1 : Indeks kinerja Kapal Pengawas x_2 : Indeks kinerja Speedboat Pengawas x_3 : Indeks kinerja Pesawat Patroli	Direktorat Pengendalian Operasi Armada dan UPT
		b. Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Formula: $x = \frac{x_a + x_b}{2}$ Keterangan: x : Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP x_a : Indeks kualitas pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP x_b : Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan
4.	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Formula: $x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$ Keterangan: x : Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			x_1 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Sektor Kelautan dan Perikanan x_2 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Kelautan dan Perikanan	
5.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP	Formula: $x = \sum_{i=1}^n \frac{(a_n \cdot b_n)}{c}$ Keterangan: x : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PSDKP a_n : Nilai indikator b_n : Bobot indikator c : Batas atas	Sekretariat Ditjen PSDKP

B. Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Terselenggaranya pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masif	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah konten yang berhasil dipublikasi dengan target rencana konten yang telah ditetapkan dalam satu tahun. $x = \left(\frac{a}{b}\right).100\%$ Keterangan: x : Persentase Produksi Konten Media Sosial a : Jumlah total konten yang diproduksi dan dipublikasikan di kanal resmi media sosial Ditjen PSDKP b : Jumlah target produksi konten yang ditetapkan dalam kalender editorial (<i>editorial plan</i>) pada periode berjalan
		Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	$x = \left(\frac{a}{b}\right).100\%$ Keterangan: x : Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP a : Jumlah berita netral dan positif terkait pengawasan SDKP b : Jumlah total semua pemberitaan terkait pengawasan SDKP
2.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Persentase Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	Jumlah total permasalahan hukum litigasi yang dimintakan/dimohonkan untuk dilakukan advokasi dibagi kegiatan advokasi yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun, yaitu: $x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n}\right) 100\%$ Keterangan: x : Persentase penyelesaian advokasi bidang pengawasan SDKP secara litigasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN											
			x_i : Jumlah perkara yang dimintakan advokasi Lingkup Ditjen PSDKP n : Jumlah kegiatan advokasi bidang pengawasan SDKP secara litigasi											
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut: <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>30</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efektivitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>2. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table> $NKA = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$ Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNEsatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	30	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efektivitas Satker	45	2. Nilai Efisiensi Satker	25
Variabel	Uraian	Bobot (%)												
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	30												
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efektivitas Satker	45												
	2. Nilai Efisiensi Satker	25												

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA: $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ bobot - Dispensasi\ SPM$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
		Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 77. Capaian hasil dihitung dengan rumus: $x = \frac{n_1 + n_2 + .. n_i}{n}$ Keterangan: x : Nilai capaian n_1 : Nilai proposal 1 n_2 : Nilai proposal 2 n : Jumlah proposal yang diajukan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1: W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2: W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3: W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4: W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	<table><tr><th colspan="2">LEVEL MATURITAS</th><th>INTERVAL SKOR</th></tr><tr><td>1</td><td>Rintisan</td><td>1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)</td></tr><tr><td>2</td><td>Berkembang</td><td>2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)</td></tr><tr><td>3</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)</td></tr><tr><td>4</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)</td></tr><tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)</td></tr></table> - Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP. - Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:	LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)	4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)	5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)						
LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR																									
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)																									
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)																									
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)																									
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)																									
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)																									

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ Keterangan: x : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ Keterangan: x : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PSDKP a : Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja b : Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja
		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ Keterangan: x : Batas Tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP a : Jumlah nilai temuan BPK pada LK Ditjen PSDKP Tahun 2024 b : Jumlah realisasi anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2024
		Indeks pelayanan publik Ditjen PSDKP	Nilai indeks pelayanan publik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 6 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi Pelayanan Publik, yakni Kebijakan Pelayanan (24%), Profesionalisme SDM (25%), Sarana Prasarana (18 %), Sistem Informasi Pelayanan Publik (11%), Konsultasi Pengaduan (10%), Inovasi (12%). Nilai Indeks Pelayanan Publik Unit Eselon I merupakan ukuran kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri Indeks pelayanan publik dilaksanakan oleh Organisasi Eselon I, verifikasi dan hasil indeks pelayanan publik dirilis melalui surat dari Pusat Data Statistik dan informasi.
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan Bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengukuran Persentase penyelesaian Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP, yaitu: $x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ x : Persentase penyelesaian Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP a : Jumlah rancangan PUU Bidang PSDKP yang disampaikan ke Biro Hukum b : Jumlah PUU Bidang PSDKP yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026
		Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Formula : $x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$ x : Nilai Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP a : Nilai Indeks kualitas pada suatu kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP b : Jumlah kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP yang dinilai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Nilai pembangunan integritas Ditjen PSDKP	Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi : a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) - a.penciptaan arsip (20%) - b.penggunaan arsip (20%) - c.pemeliharaan arsip (35%) - d.penyusutan arsip (25%) 2. Sumber daya kearsipan (bobot 30%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%) - b.prasarana dan sarana (50%)
		Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%), implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.
		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dilakukan secara mandiri terhadap kuesioner yang berisikan 5 (lima) komponen indikator, yaitu (a) mengumumkan informasi publik, (b) menyediakan dokumen informasi publik, (c) pengembangan website, (d) barang dan jasa, dan (e) kelembagaan, dengan formula sebagai berikut: Nilai Kuisisioner = Nilai verifikasi x 80% Nilai Uji Publik = Total Nilai Juri x 20% Nilai Akhir = Nilai Kuisisioner + Nilai Uji Publik Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi diberikan dengan kualifikasi: • Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100; • Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9; • Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9; • Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan • Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9. Target = Menuju Informatif (80)
		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	$x = \frac{a}{b} \cdot 100\%$ x : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP a : Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP b : Pagu Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase implementasi kerja sama	Pengukuran Persentase Implementasi Kerja Sama, yaitu: $x = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \right) \times 100 \%$ x : Persentase kerja sama yang terimplementasi x_n : Nilai implementasi kerja sama yang disepakati n : Jumlah kerja sama yang masih berjalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	Pengukuran Nilai Efektivitas Sekretariat RPOA-IUU, yaitu: $I_e = (20\% \cdot x_1) + (50\% \cdot x_2) + (30\% \cdot x_3)$ x_1 : Nilai Layanan Sekretariat (bobot 20%) x_2 : Nilai pelaksanaan tahapan adopsi dokumen (bobot 50%) x_3 : Nilai pelaksanaan tahapan kegiatan dalam annual workplan (bobot 30%)
		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut: 1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi. 5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud. 6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud. Variabel 1 (V1) = Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%). Data dukung: Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. Variabel 2 (V2) = $x = \frac{a}{b} \cdot 40\%$ Keterangan: <i>a</i> : Jumlah Probis Level 3 yang selesai disusun dan telah di verifikasi <i>b</i> : Jumlah Provis level 3 yang harus disusun Data dukung: Dokumen Provis level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro SDMAO Variabel 3 (V3) = Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%) Data dukung: Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. Variabel 4 (V4) = $x = \frac{a}{b} \cdot 25\%$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			Keterangan: <i>a</i> : Jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi <i>b</i> : Jumlah SOP yang harus disusun Data dukung: Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan matrik identifikasi judul SOP Variabel 5 (V5) = a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3 (5%); b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%). Data dukung: a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan b. Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Variabel 6 (V6) = a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%); b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%). Data dukung: a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi. Nilai Total = V1+V2+V3+V4+V5+V6

C. Indikator Kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																		
1.	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	$x = \frac{x_1}{x_2} \cdot 100\%$ Keterangan: x : Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%) x_1 : Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP x_2 : Jumlah WPP NRI																		
		Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	$a = \frac{xi}{yi}$ Keterangan: a : Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP xi : Jumlah nilai SKM yang telah dilaksanakan yi : Jumlah SKM yang telah dilaksanakan <table><tr><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1,00 – 2,59</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2,60 – 3,06</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3,07 – 3,52</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>3,53 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik																		
3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
2.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	Indeks operasi kapal pengawas	$ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_i)}{n}$ Keterangan: ikp : Indeks Kinerja Kapal Pengawas x_i : Capaian kinerja Kapal Pengawas n : Jumlah Kapal Pengawas yang beroperasi
		Indeks operasi pesawat patroli	$i_{pp} = (30\%.a) + (15\%.b) + (15\%.c) + (15\%.d) + (15\%.e) + (5\%.f) + (5\%.g)$ Keterangan: ipp : Indeks Operasi Pesawat Patroli a : Variable Cakupan Wilayah Pengawasan b : Variable Kapal Perikanan yang di Validasi c : Variable Pemantauan Objek Kelautan d : Variable Informasi Target Operasi yang diberikan ke Kapal Pengawas e : Variable Pelaksanaan Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717) f : Variable Dukungan Operasi Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi bersama, dan/atau Terkoordinasi g : Variable Dukungan Operasi lainnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	$a = \sum_{i=1}^n \frac{(nx_1 + nx_2 + \dots + nx_8)}{n}$ Keterangan: a : Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan n : Jumlah Responden x_1 : Penyediaan Logistik BBM x_2 : Penyediaan Logistik Minyak Pelumas x_3 : Penyediaan Logistik Air Tawar x_4 : Penyediaan Logistik Ongkos Angkut BBM x_5 : Penyediaan Bahan Makanan (Natura) x_6 : Penyediaan Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh x_7 : Penyediaan Biaya Delegasi x_8 : Penyediaan Biaya Jaga Sandar
		Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	$IKA = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n}$ Keterangan: IKA : Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas x_i : Nilai Awak Kapal Pengawas n : Jumlah Awak Kapal Pengawas
		Persentase Ketersediaan Personil Armada Pengawasan	$P = (60\% \cdot N_1) + (40\% \cdot N_2)$ Keterangan: P : Ketersediaan Personel Armada Pengawasan N_1 : Jumlah Ketersediaan AKP KP. Operasi Pengawasan N : Jumlah Ketersediaan AKP KP. Saat Tidak Operasi Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	$LO = (A_{kk}) + (A_{nk}) + (A_{pk}) + (A_{kp}) + (A_{tl})$ Keterangan: LO : Laik Operasional A_{kk} : Aspek konstruksi kapal A_{nk} : Aspek navigasi dan komunikasi A_{kp} : Aspek keselamatan dan pemadam A_{pk} : Aspek permesinan dan kelistrikan A_{tl} : Aspek tambat labuh
3.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ x_{NSP} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP. n : Jumlah target rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP yang diselesaikan.
4.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengendalian Operasi Armada	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ IP_1: $W_{1j} \cdot R_{1j}$ IP_2: $W_{2k} \cdot R_{2k}$ IP_3: $W_{3l} \cdot R_{3l}$ IP_4: $W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko																								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Rekomendasi} = (\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$ Keterangan: ΣN_t : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 ΣN : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) a.penciptaan arsip (20%), b.penggunaan arsip (20%), c.pemeliharaan arsip (35%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 30%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%), b.prasarana dan sarana (50%)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																
		Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengendalian Operasi Armada	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabillitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
Nilai	Predikat																		
>89 – 100	Sangat Memuaskan																		
>80 – 89	Memuaskan																		
>70 – 79	Sangat Baik																		
>60 – 69	Baik																		
>50-60	Cukup																		
>30 – 50	Kurang																		
0 – 30	Sangat Kurang																		
		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja																

D. Indikator Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan	$x_k = \sum_{k=0}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$ Keterangan: x : Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan X : Skor responden/audiens n : Jumlah responden/audiens
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	$x = (a.0,8) + (b.0,2)$ Keterangan: x : Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan b : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha
		Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	$x = \frac{a + b}{2}$ Keterangan: x : Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan a : Nilai tahapan supervisi hasil pengawasan b : Nilai tahapan pelaksanaan pengawasan
		Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan	$x = (x_a.0,5) + (x_b.0,5)$ Keterangan:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			x : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK x_a : Nilai tahapan pembinaan pengawasan sumber daya kelautan x_b : Nilai tahapan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	$y = (x_{tahap} \cdot 0,7) + (x_{respon} \cdot 0,3)$ Keterangan: y : Nilai kualitas operasi intelijen kelautan x_{tah} : Nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intelijen kelautan x_{res} : Nilai respon operasi intelijen kelautan
		Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	$x = \frac{\sum a}{b}$ Keterangan: x : Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan a : Nilai hasil supervisi intelijen Kelautan b : Skor maksimum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
4.	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan	Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	$x_{ps} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$ Keterangan: x_{ps} : Persentase penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil x_n : Persentase capaian masing-masing kegiatan penyelesaian sengketa WP3K n : Jumlah kegiatan penyelesaian sengketa WP3K
5.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	$x_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$ Keterangan: x_{nsp} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDK x_i : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK Lingkup Direktorat PSDK n : Jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDK yang diselesaikan
6.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1: W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2: W_{2k} \cdot R_{2k}$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			$IP_3: W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4: W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	$x = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: x : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko																								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = (\Sigma N_t) / (\Sigma N) \times 100\%$ Keterangan: ΣN_t : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 ΣN : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) - a.penciptaan arsip (20%), - b.penggunaan arsip (20%), - c.pemeliharaan arsip (35%) - d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 30%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%), - b.prasarana dan sarana (50%)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																
		Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabililitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:																
			<table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
			Nilai	Predikat															
			>89 – 100	Sangat Memuaskan															
			>80 – 89	Memuaskan															
			>70 – 79	Sangat Baik															
			>60 – 69	Baik															
			>50-60	Cukup															
			>30 – 50	Kurang															
		0 – 30	Sangat Kurang																
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja																		

E. Indikator Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan	$x_{sadar} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n}$ Keterangan: x_{sadar} : Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan x_i : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan n : Jumlah responden
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ y_{waskan} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan x_i : Nilai komponen yang tersedia n : Jumlah komponen yang tersedia.
		Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	$y_{supervisi} = (x_{prosedur} * 0.5) + (x_{perbaikan} * 0.2) + (x_{indikasi} * 0.3)$ Keterangan: y_{spv_waskan} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan $x_{prosedur}$: Persentase pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			$x_{perbaikan}$: Persentase temuan hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan yang ditindaklanjuti $x_{indikasi}$: Persentase temuan hasil pemeriksaan berupa indikasi pelanggaran yang ditindaklanjuti
		Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	$x_{pembinaan} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + ...x_n)}{n}$ Keterangan: $x_{pembinaan}$: Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan x_i : Nilai komponen yang tersedia n : Jumlah komponen yang tersedia
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	$y_{koip} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$ Keterangan: y_{koip} : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan x_{tahap} : Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan x_{respon} : Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan
		Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	$y_{ksoip} = \frac{\sum \text{nilai supervisi}}{\text{skor maksimum}} \times 100$ Dimana $\text{Skor Maksimum} = n \times k \times S_{max}$

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			Keterangan: n : Jumlah responden k : Jumlah pernyataan smax : Skala tertinggi penilaian
4.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	$X_{nspk} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$ Keterangan: X_{nspk} : Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan X_i : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK Lingkup Direktorat P n : Jumlah target penyelesaian rancangan NSPK bidang Pemantauan Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang diselesaikan
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1: W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2: W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3: W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4: W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
			$W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya	$x = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: x : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko																								

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Perikanan	b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) - a.penciptaan arsip (20%) - b.penggunaan arsip (20%) - c.pemeliharaan arsip (35%) - d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 30%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%), - b.prasarana dan sarana (50%)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																
		Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilititas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
Nilai	Predikat																		
>89 – 100	Sangat Memuaskan																		
>80 – 89	Memuaskan																		
>70 – 79	Sangat Baik																		
>60 – 69	Baik																		
>50-60	Cukup																		
>30 – 50	Kurang																		
0 – 30	Sangat Kurang																		
		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja																

F. Indikator Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	$x = (0,5. x_1) + (0,5. x_2)$ Keterangan: x : Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan x_1 : Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan x_2 : Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
		Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	$x = (0,4. d_1) + (0,6. d_2)$ Keterangan: x : Tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP d_1 : Tingkat tindak lanjut hasil analisis SPKP (bukan pelanggaran dan pelanggaran) d_2 : Tingkat hasil analisis SPKP (LIP/Lembar Indikasi Pelanggaran) yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan
		Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	$IPTL = \sum_{i=1}^n \left(\frac{P_a + P_b}{n} \right)$ Keterangan: $IPTL$: Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif P_a : Nilai pemenuhan tahapan pengenaan sanksi administratif P_b : Nilai pemenuhan tahapan permohonan penerbitan billing PNB n : Jumlah penetapan sanksi administratif
2.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	$y = (0,5. y_1) + (0,5. y_2)$ Keterangan:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
	Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		y : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan y_1 : Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan y_2 : Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
		Indeks kualitas supervisi penanganan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan	$\mu = \sum_{1}^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{3}$ Keterangan: μ : Indeks kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan Pa : Nilai tahapan perencanaan supervisi penanganan TPKP Pb : Nilai tahapan pelaksanaan supervisi penanganan TPKP Pc : Nilai tahapan pelaporan supervisi penanganan TPKP n : Jumlah kasus yang telah disupervisi
		Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain	$IS = \frac{a}{n1} + \frac{b}{n2} + \frac{c}{n3}$ Keterangan: IS : Indeks sinergi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain a : Jumlah kegiatan koordinasi dengan lembaga lain yang dilaksanakan b : Jumlah kegiatan harmonisasi penanganan pelanggaran yang dilaksanakan c : Jumlah kegiatan integrasi data TPKP Nasional yang dilaksanakan $n1$: Jumlah kegiatan frekuensi koordinasi dengan lembaga lain yang direncanakan $n2$: Jumlah kegiatan harmonisasi penanganan pelanggaran yang direncanakan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			n3 : Jumlah kegiatan integrasi data TPKP Nasional yang direncanakan
		Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	$\alpha = \frac{Pa + Pb}{n} \cdot 100\%$ Keterangan: α : Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan Pa : Nilai pemenuhan tahapan penyelesaian produk intelijen Pb : Nilai pemenuhan tahapan pemanfaatan produk intelijen n : Jumlah bulan dalam periode pelaporan
		Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau	$x = a + b + c$ Keterangan: x : Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dipantau a : Persentase laporan hasil pemantauan penanganan TPKP (25%) b : Persentase laporan hasil pemantauan pengenaan sanksi administrasi kelautan (25%) c : Persentase laporan hasil pemantauan pengenaan sanksi administrasi perikanan (SPKP dan non SPKP) (50%)
		Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakkan Hukum Kelautan dan Perikanan	$\frac{(a + b)}{n}$ Keterangan: x : Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan a : Nilai fasilitasi administrasi PPNS Perikanan b : Nilai pengembangan kapasitas PPNS Perikanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			n : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
3.	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	$x_{NSPK} = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan: x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan a : Jumlah rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan yang diselesaikan b : Jumlah target rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan
4.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1: W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2: W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3: W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4: W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
			$W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-1 dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-1 $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	$x = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: x : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko																								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) a.penciptaan arsip (20%) b.penggunaan arsip (20%) c.pemeliharaan arsip (35%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 30%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%) b.prasarana dan sarana (50%)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																
		Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
Nilai	Predikat																		
>89 – 100	Sangat Memuaskan																		
>80 – 89	Memuaskan																		
>70 – 79	Sangat Baik																		
>60 – 69	Baik																		
>50-60	Cukup																		
>30 – 50	Kurang																		
0 – 30	Sangat Kurang																		
		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja																

G. Indikator Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	$i_{dat} = \frac{f_1 + f_2 + f_3}{f_3}$ i_{dat} : Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas f_1 : Jumlah rata-rata UPT PSDKP yang dilaksanakan supervisi f_2 : Kesesuaian pembinaan Pokmaswas f_3 : Tindak lanjut supervisi pembinaan Pokmaswas
		Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan pedoman x_n : Nilai penyelesaian rancangan pedoman n : Total nilai proses penyelesaian
2.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	$P_{pss} = \left(\frac{\sum a1 + a2 + \dots + an}{b} \right)$ Keterangan: P_p : Persentase sarana pengawasan sesuai standar teknis (%) an : Jumlah indeks sarana yang sesuai standar kriteria pengawasan PSDKP (%) b : Jumlah indeks maksimal total sarana pengawasan PSDKP
		Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	$P_{psp} = \left(\frac{\sum a1 + a2 + \dots + an}{b} \right)$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			Keterangan: P_{psp} (%) : Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP an : Jumlah prasarana yang sesuai standardisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP b : Jumlah Lokasi UPT PSDKP
		Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	$P_{psp} = \left\{ \left(\frac{30}{100} \cdot \underline{akk} \right) + \left(\frac{25}{100} \cdot \underline{akm} \right) + \left(\frac{20}{100} \cdot \underline{akd} \right) + \left(\frac{15}{100} \cdot \underline{akg} \right) + \left(\frac{10}{100} \cdot \underline{aktips} \right) \right\}$ Keterangan: i_p : Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP $\underline{akk}$: nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana fungsional $\underline{akm}$: nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana operator $\underline{akd}$: nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana dermaga $\underline{akg}$: nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana gudang $\underline{aktips}$: nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana rumah penampungan sementara
		Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$ Keterangan: x : nilai penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan x_n : nilai tahapan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan n : Total nilai tahapan rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan
		Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			Keterangan: x : nilai penyusunan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan x_n : nilai tahapan penyusunan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan n : Total nilai tahapan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP
		Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	$x = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n}$ Keterangan: x : nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP x_n : nilai tahapan rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP n : nilai standar kriteria teknis pembangunan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan
		Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	$x = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n}$ Keterangan: x : nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDI x_n : nilai tahapan rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDI n : nilai standar kriteria teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1: W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2: W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3: W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4: W_{4m} \cdot R_{4m}$

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	$x = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: x : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko																								
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit																								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																
			Kerja Level 2 Σ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2																
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) a.penciptaan arsip (20%) b.penggunaan arsip (20%) c.pemeliharaan arsip (35%) d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 30%) a.sumber daya manusia kearsipan (50%) b.prasarana dan sarana (50%)																
		Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabillitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
		Nilai	Predikat																
>89 – 100	Sangat Memuaskan																		
>80 – 89	Memuaskan																		
>70 – 79	Sangat Baik																		
>60 – 69	Baik																		
>50-60	Cukup																		
>30 – 50	Kurang																		
0 – 30	Sangat Kurang																		
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja																		

H. Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	$I_k = \sum_{k=0}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots . x_n)}{n}$ Keterangan: I_k : Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS x_n : Nilai kualitas pembinaan setiap kelompok Pokmaswas n : Jumlah kelompok
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	$ikp = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n}$ Keterangan: ikp : Indeks Kinerja Kapal Pengawas x_i : Capaian kinerja Kapal Pengawas n : Jumlah Kapal Pengawas yang beroperasi
		Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	$isb = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}$ Keterangan: isb : Indeks operasi speedboat x_i : Capaian kinerja speedboat n : Jumlah speedboat a : Variabel pemeriksaan b : Variabel cakupan wilayah pengawasan c : Variabel hasil dan tindak lanjut operasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
3.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	$y = (x_{tahap} \cdot 0,7) + (x_{respon} \cdot 0,3)$ Keterangan: y : nilai kualitas operasi intelijen kelautan x_{tc} : Nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intel kelautan x_{ri} : Nilai respon operasi intelijen kelautan
		Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	$y_{koip} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$ Keterangan: y_{koip} : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan x_{tahap} : Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan x_{respon} : Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	$x = (a. 0,8) + (b. 0,2)$ Keterangan: x : nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan a : Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan b : Nilai tindak lanjut rekomendasi pelaku usaha
5.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	$y_{waskan} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ y_{waskan} : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan x_i : Nilai komponen yang tersedia n : Jumlah komponen yang tersedia.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN											
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	$x = (0,5 \cdot x_1) + (0,5 \cdot x_2)$ x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan x_1 : Jumlah penetapan sanksi administratif x_2 : Jumlah sanksi administratif yang diproses											
		Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	$x_{TLH} = \sum \left(\frac{(X1 + X2 + Xn)}{n} \right) \times 100\%$ Keterangan : x : Pemeriksaan hasil analis pemantauan SDKP x_n : Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaan sanksi administratif SPKP n : Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan											
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	$y = (0,5 \cdot y_1) + (0,5 \cdot y_2)$ Keterangan : y : Indeks penyelesaian penyidikan TPKP y_1 : Jumlah kasus TPKP yang selesai y_2 : Jumlah kasus TPKP yang ditangani											
8.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP	NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut: <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>30</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efektivitas Satker</td><td>45</td></tr><tr><td>2. Nilai Efisiensi Satker</td><td>25</td></tr></table> $NKA = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	30	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efektivitas Satker	45	2. Nilai Efisiensi Satker	25
Variabel	Uraian	Bobot (%)												
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	30												
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efektivitas Satker	45												
	2. Nilai Efisiensi Satker	25												

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																											
			Keterangan: NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker NESatker : Nilai Efisiensi Satker WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker																											
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. Nilai IKPA : $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ bobot - Dispensasi\ SPM$ • Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai • Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1: W_{1j} \cdot R_{1j}$ $IP_2: W_{2k} \cdot R_{2k}$ $IP_3: W_{3l} \cdot R_{3l}$ $IP_4: W_{4m} \cdot R_{4m}$ Keterangan: IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} \cdot R_{1j}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-j dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-j $W_{2k} \cdot R_{2k}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-k dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-k $W_{3l} \cdot R_{3l}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-l dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-l $W_{4m} \cdot R_{4m}$: Bobot Indikator Kualifikasi ke-m dikalikan rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																								
		Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	$x = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: x : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a : Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko b : Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko																								
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.																								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
			Jml Rekomendasi = $(\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
		Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: U1-Persyaratan Layanan U2-Kemudahan Prosedur U3- Waktu Penyelesaian U4-Kesesuaian Biaya U5-Kesesuaian Produk U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas U8-Layanan Konsultasi U9-Kualitas Isi/Sarana Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut: >88,31 : Sangat Baik 76,61-88,30 : Baik 65,00-76,60 : Kurang Baik 25,00-64,99 : Tidak Baik Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
		Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; 2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% semua area pengungkit; 3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0. 4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15. 5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP	Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) - a.penciptaan arsip (20%) - b.penggunaan arsip (20%) - c.pemeliharaan arsip (35%) - d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 30%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%), - b.prasarana dan sarana (50%)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN																
		Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan asepek aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%), implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabillitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu: <table><tr><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>>89 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>>80 – 89</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>>70 – 79</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>60 – 69</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai	Predikat	>89 – 100	Sangat Memuaskan	>80 – 89	Memuaskan	>70 – 79	Sangat Baik	>60 – 69	Baik	>50-60	Cukup	>30 – 50	Kurang	0 – 30	Sangat Kurang
Nilai	Predikat																		
>89 – 100	Sangat Memuaskan																		
>80 – 89	Memuaskan																		
>70 – 79	Sangat Baik																		
>60 – 69	Baik																		
>50-60	Cukup																		
>30 – 50	Kurang																		
0 – 30	Sangat Kurang																		
		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.																

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.